BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum *International Maritime Organization* (IMO)

International Maritime Organization (IMO) merupakan organisasi internasional yang memiliki kepentingan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan konvensi internasional yang berkaitan dengan pencemaran laut. IMO dibentuk pada tahun 1958 saat konferensi internasional Genewadiadakan mengenai tindakan efektif bagi negara-negara maritim untuk permasalahan pencemaran laut.Tujuan Organisasi, seperti yang dirangkum oleh Pasal 1 (a) Konvensi, adalah "untuk menyediakan mesin untuk kerjasama antara Pemerintah di bidang regulasi pemerintah dan praktik yang berkaitan dengan masalah teknis dari semua jenis pengiriman yang mempengaruhi terlibat dalam perdagangan internasional, untuk mendorong dan memfasilitasi adopsi umum dari standar tertinggi dalam hal-hal praktis tentang keselamatan maritim, navigasi dan efisiensi pencegahan dan pengendalian pencemaran laut dari kapal ".Organisasi ini juga diberdayakan untuk menangani masalah-masalah administratif dan hukum yang berkaitan dengan tujuan ini (diakses dari http://www.imo.org/About/HistoryOfIMO/Pages/Default.aspx pada 30 Agustus 2012 Pukul 22.31 WIB)dan melakukan aktivitas organisasinya di berbagai region, termasuk wilayah Asia Timur.

IMO menetapkan PEMSEA *(Partnerships in the Environmental Management for Seas of East Asia)*yang didirikan di Manila, Filipina dengan implementasi

Integrated Coastal Management (ICM) sebuah sistem pengelolaan pesisir terpadu yang holistik/ menyeluruh untuk pengembangan dan kemajuan wilayah perairan di Asia Timur dengan tujuan membangun kawasan perairan Asia Timur secara berkelanjutan sesuai dengan konsep lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.

Keterlibatan IMO sebagai *agency* yang fokus pada pencemaran lingkungan laut untuk membentuk PEMSEA sebagai program regional mengingat banyaknya potensi-potensi yang dimiliki oleh perairan wilayah Asia Timur mulai dari pengekspor ikan terbesar, pemilik terumbu karang terluas, jalur perairan tersibuk sehingga membuat perairan wilayah Asia Timur menjadi kawasan yang harus dikelola untuk menopang jalannya perekonomian dunia.

Dalam pelaksanaan program PEMSEA, IMO bertindak sebagai payung dalam *regional programme* PEMSEA dan penyedia dana yang mendukung kinerja PEMSEA di wilayah Asia Timur. Sehingga dalam menyepakati kerjasama-kerjasama di region Asia Timur, IMO melaksanakannya melalui PEMSEA. Segala bentuk pelaksanaan yang dilakukan di wilayah Asia Timur dalam mengimplementasikan ICM dilakukan oleh PEMSEA dengan membentuk struktur organisasi sendiri sebagai upaya efektifitas dan efisiensi kinerja program. Struktur keanggotaan PEMSEA kemudian diresmikan pada tahun 2003 melalui Deklarasi Putra jaya di Malaysia yang menetapkan negara anggota, dan penyusunan program strategis untuk mengimplementasikan ICM melalui kerangka Pembangunan Berkelanjutan bagi kawasan perairan Asia Timur (*Sustainable Development Strategy Seas of East Asia*).

Seiring berjalannya waktu, kemandirian PEMSEA dalam kesungguhan melaksanakan program ICM untuk region Asia Timur membuat PEMSEA berinisiatif melegalkan diri sebagai organisasi internasional pada tahun 2009 ditandai dengan adanya dokumen *legal personality* yang menyatakan PEMSEA sebagai lembaga resmi yang mandiri untuk pelaksanaan program ICM di wilayah Asia Timur. Akan tetapi IMO sebagai induk awal PEMSEA terbentuk tetap melakukan kontribusi pendanaan bagi PEMSEA untuk menjalankan programnya (*Memorandum of Agreement* antara IMO dan pemerintah Kabupaten Sukabumi).

3.2 Gambaran Umum *Partnership in Environmental Management for the Seas of East Asia* (PEMSEA)

Fungsi laut tidak terlepas dalam menjembatani aktivitas-aktivitas yang dilakukan antara daratan satu ke daratan lainnya baik yang kepemilikannya bersifat nasional atau bahkan teritori milik negara lain. Maka dari itu perlu adanya kerjasama atau interaksi antar negara yang memiliki kepentingan dalam jalur perairan yang menjadi kebutuhan bersama dan secara geografis juga menjadi bagian wilayah negara, hal ini berfungsi sebagai bentuk tanggungjawab bersama dalam menjaga kelestarian wilayah perairan.

Seperti halnya wilayah laut diAsia Timuryangberbatasan langsung denganbeberapa negara meliputi Cina,Korea Selatan,Korea Utara, Jepang, Filipina,Indonesia, BruneiDarussalam, Malaysia,Singapura, Thailand, Kamboja, dan Vietnam.Wilayah inimeliputiserangkaian ekosistemlaut yang besar, subregionallaut, daerah pesisir, danlembah sungaiyang terkaityangsaling

terhubung dalamskala besar, sebagai tempat perubahan iklimkelautandanproses alamberupa fenomena, misalnya siklus angin topan,dan migrasispesies yang membuat wilayah perairan di Asia Timur begitu dinamis.Laut Cina Timur, LautKuning, Laut Cina Selatan, LautSulu-Sulawesi, danLaut Indonesiatermasuk laut penting bagi sistemekologi dansumber ekonomi bagi wilayah Asia Timur yang sering disebut sebagai *Large Marine Ecosystems* (LMEs). Kelimalaut tersebutadalah semi-tertutup dan saling terhubung,strategis, dansecara geologis, unik, dalamsistem perairaninternasional.

Laut Cina Timurmemiliki karakteristik sebagai perairanpantai yang dangkalyang memberikantempat awal pembibitan bagi banyakikan. SementaraLautKuning merupakan sumberdaya perairanbagi negara Korea Utara, China, dan Korsel, memilikigeografisyang unikdan komplekskarena kondisioseanografiyang khas daridaerah tersebut.Ini mencakupLaut Bohaidi utarayang terhubung denganLaut Cina Timurdi selatan, membentuk sistemsirkulasi yangterus menerus.

Selanjutnya, Laut Cina Selatan, yang terletak di dalamlautIndo-Pasifik Barat telah lama dikenalsebagaipusat globalkeanekaragaman hayati lautdangkal, yang beriklimtropis.Berbatasan denganCinadi utara,Filipinadi timur,Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Brunei Darussalamdi selatan; Thailand, Kamboja, dan Vietnamdi sebelah barat.

Daerah-Sulu,Laut Sulawesiadalah salah satulingkungan yang palingberagam sumber hayati lautnya.Laut Sulawesi dikelilingioleh beberapa negara antara lain Malaysia, Filipina, dan Indonesia.Di antarapulau-pulau diIndonesiadalam wilayah

yurisdiksimemiliki LMEs berupaLautIndonesia.Zona ini sangat penting karena memilikikeanekaragaman hayatiyang sangat banyak, termasuk disektorperikanan, yang sering berbagi ke negara lain dalam pola migrasi ikan yang tak menentu (misalnya, tuna, mackerel, bulat *scad*) dengan negara-negarayang berdekatan(Australia,Filipina danMalaysia).Mayorarus lautyangberasaldari UtaradanPasifik Selatankesisi timurbenua Asia.Dalam pergerakan arus ini ternyatamembantu menghasilkanzona*upwelling*yang memberikan kontribusiproduktivitas yang tinggi.Arus inijugamembawapenyebaranlarva danmerekrutorganismepesisir danlaut dalam jarak yang jauh sekali pun.Arusutamamungkin jugadipengaruhipertumbuhan terumbukarangdi LautAsia Timurkarenaair hangatyang berasal darikhatulistiwa (PEMSEA,2003).

Karena potensi laut di Asia Timur sangat besar manfaatnya. Selain sebagai penyumbang oksigen laut terbesar di dunia juga merupakan pusat ekosistem rantai makanan terbesar di dunia. Dari potensi sumberdaya kelautan yang dimiliki maka masing-masing negara yang bersangkutan memiliki upaya tersendiri untuk mengoptimalkan hasil laut sebagai sektor ekonomi yang harus diprioritaskan baik dalam membangun perekonomian nasional maupun global. Hingga pada akhirnya masing-masing negara yang memiliki keterhubungan dengan wilayah perairan di Asia Timur melakukan kesepakatan bersama dengan mendeklarasikan diri dalam*Partnership in Environmental Management for the Seas of East Asia*(PEMSEA).

PEMSEA merupakan sebuah *international governmental organization* yang melibatkan berbagai negara untuk kelestarian wilayah perairan di Asia

Timur, yang anggotanya melibatkan negara/pemerintah pusat dan daerah, masyarakat sipil, sektor swasta, lembaga penelitian dan pendidikan, masyarakat, lembaga internasional, program daerah, lembaga keuangan dan para donatur. Hal tersebut juga merupakan salah satu mekanisme koordinasi regional untuk implementasi *Sustainable Development Strategy for Seas of East Asia* (SDS-SEA) (diakses dari http://beta.pemsea.org/about-pemsea pada 5 Mei 2012 pukul 19.35 Wib).

Bertugas untuk memfasilitasi realisasi dari SDS-SEA bersama visi, misi, program aksi dan perubahan yang diinginkan, PEMSEA mengumpulkan para pemangku kepentingan dari berbagai negara di wilayah Asia Timur untuk bekerja sama dan bertindak secara dinamis dan terkoordinasi dalam SDS-SEA dan Pembangunan Berkelanjutan dalam kerangka wilayah pesisir. Tujuannya adalah untuk memperkuat konsensus di antara para anggota pada pendekatan dan strategi untuk mengatasi ancaman yang diidentifikasi untukkelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan wilayah perairan di Asia Timur, sertauntuk membangun kepercayaan di antara para anggotanya melalui proyek-proyek kolaboratif dan program, untuk mencapai sinergi dan keterkaitan dalam melaksanakan SDS-SEA di antara para anggota. Untuk membangun wilayah pesisir dan laut yang berkelanjutan agar dapat mengurangi kesenjangan antar daerah di dalam Negeri dalam kapasitas pengelolaan pesisir secara terpadu.Dalam mendukung pemerintah dan mitra *stakeholder* untuk mewujudkan visi dan misi bersama, PEMSEA mengimplementasikan berbagai program dengan fokus pada kategori berikut:

1. *Partnerships and Management*

   Terdiri dari kegiatan yang mengarah ke pembentukan jangka panjang, mandiri, dengan mekanisme regional yang bertujuan untuk mengefektifkan implementasi SDS-SEA.

2. *Core Operations*

   Terdiri dari kegiatan yang secara langsung membantu negara-negara pada reformasi kebijakan nasional, *scaling up* dari program*Integrated Coastal Management* (ICM) di tingkat pemerintah pusat dan daerah, kerjasama teknis dalam manajemen terpadu dan berbasis ekosistem Daerah Aliran Sungai(DAS), muara sungai dan pesisir pantai yang berdekatan.

3. *Supporting Activities*

   Terdiri dari kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan manusiaatau Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan, ilmiah, teknis, sumber hukum dan informasi yang diperlukan untuk kinerja yang memuaskan dari program-program , dan memfasilitasi keberlanjutan SDS-SEA.(diakses dari http://beta.pemsea.org/about-pemsea pada 5 Mei 2012 pukul 19.35 Wib).

3.2.1 *Sustainable Development Strategy for The Seas of East Asia* (SDS-SEA)

Keputusan untuk menyiapkan Strategi Pembangunan Berkelanjutan untuk wilayah perairan Asia Timur muncul dari pertemuan *intergovernmental meeting* dari 11 negara Asia Timur yang diselenggarakan di Dalian pada Juli 2000. Negara

yang ikut serta adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Timor Leste, Laos, Cina, Korea Selatan, Singapura,Filipina, Thailand dan Vietnam. Pada bulan Maret tahun 2002*intergovenrmental meeting* kembali diadakan PEMSEA, saat itu Jepang ikut bergabung, sehingga negara-negara yang ikut serta tersebut sepakat dalam membentuk Strategi Pembangunan Berkelanjutan untuk wilayah perairan Asia Timur yang selanjutnya disebut *Sustainable Development Strategy for the Seas of East Asia* (SDS-SEA) yang meliputi lintas sektoral di tingkat nasional, regional, dan internasional. Strategi adalah produk dari upaya bersama oleh negara-negara yang bersangkutan dan stakeholder lainnya.

Strategi Pembangunan Berkelanjutan adalah paket prinsip-prinsip yang berlaku, relevan dengan program aksi di tingkat regional dan internasional, instrumen perjanjian, serta implementasi pendekatan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di wilayah perairan Asia Timur. Strategi Pembangunan Berkelanjutan menawarkan kerangka regional untuk negara-negara dan para *stakeholders* lainnya yang tertarik untuk melaksanakansebuah pengelolaan terpadu atas dasar komitmen bersama yang telah dibuat, tanpa mengasumsikannya sebagai kewajiban hukum yang baru. Hal ini dialamatkan untuk hubungan sosial, masalah budaya, ekonomi dan lingkungan. Ini mewujudkan visi bersama dari negara-negara dan pemangku kepentingan lainnya untuk Laut Asia Timur, dan cara-cara dengan mana mereka akan mencapai visi bersama. Starategi tidak mencerminkan negara individu, organisasi internasional, atau kepentingan sektoral tapi menyajikan perspektif regional, prinsip, dan

pedoman, dan sebuah platform untuk masing-masing untuk saling bekerja sama dalam addresing masalah umum dan keprihatinan.

Strategi Pembangunan Berkelanjutan didasarkan pada pendekatan program dan konsensus yang dicapai antara negara-negara dan pemangku kepentingan lainnya terutama yang berkaitan dengan kebutuhan, sifat, dan tujuan, peran pokok dan fungsi, ruang lingkup aplikasi dan elemen penting.

Strategi Pembangunan Berkelanjutan merupakan pendekatan implementasi untuk manajemen penggunaan dan berkelanjutan yang terintegrasi dari lingkungan dan sumber daya di dalamnya, dengan tujuan untuk mewujudkan manfaat sebagai berikut:

1. Mempromosikan pengaturan kemitraan regional antara instansi pemerintah, LSM, sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya;
2. Mengaktifkan program pada dinas terkait yang beroperasi di wilayah untuk semua tingkatan, dalam mempromosikan dampak sinergis dan kumulatif upaya dan keahlian untuk kepentingan negara dan pemangku kepentingan lainnya;
3. Memberikan pedoman atau referensi bagi negara dan *stakeholders* lainnya untuk membantu perkembangan dari strategi, kebijakan, dan rencana implementasi untuk mengatasi spesifik masalah nasional, kebutuhan daerah, dan sektoral;
4. Menawarkan serangkaian pendekatan operasional dan langkah-langkah untuk pengembangan pesisir dan laut berkelanjutan yang telah terbukti

cocok dan efektif melalui satu dekade kegiatan demonstrasi dan penyuluhan di daerah;

5. Memfasilitasi pertukaran dan transfer pengalaman, pengetahuan teknologi, dan teknik, serta saling membantu antara negara-negara pada berbagai tahap pembangunan sosial ekonomi, dan
6. Memfasilitasi aliran dukungan dan bantuan dari lembaga pembiayaan dan lembaga donor, dan penciptaan pendukung mekanisme pembiayaan serta peluang investasi untuk pengembangan pesisir dan laut berkelanjutan.

3.2.1.1 Visi, Misi dan *Framework* SDS-SEA

Dalam melaksanakan tujuannya, SDS-SEA memiliki visi sebagai berikut: "Sistem sumber daya dari Pembangunan berkelanjutan di wilayah perairan Asia Timur adalah warisan alam bagi masyarakat di wilayah ini; media akses ke pasar regional dan global; perlindungan untuk persediaan makanan yang sehat dan aman; penghidupan yang layak; kemakmuran ekonomi untuk eksistensi generasi yang akan datang".

Misi:

"Untuk membangun kemitraan antar lintas sektoral, dan kemitraan antar pemerintah untuk mencapai pembangunan yang berkesinambungan di wilayah perairan Asia Timur".

Kerangka Strategi:

"Berdasarkan Bab 17 Agenda 21 dan Rencana Pelaksanaan *World Summit on Sustainable Development* tentang samudera, laut, pulau, dan wilayah pesisir hanya

dapat diterapkan secara efektif melalui pendekatan terpadu, dan koordinasi dan kerjasama yang efektif di semua tingkatan, untuk pengelolaan pesisir dan laut" (PEMSEA, 2003).

3.2.1.2 Prinsip umum SDS-SEA

SDS-SEA memiliki prinsip-prinsip umum, antara lain:

1. Pembangunan yang berkesinambungan di wilayah perairan Asia Timur akan dikejar melalui penerapan pendekatan manajemen terpadu sebagai kerangka yang menyeluruh, dimana proyek-proyek strategis dan program yang dibentuk dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan perlindungan lingkungan dan konservasi sumber daya serta kesejahteraan dan martabat rakyat daerah.
2. Hak untuk pembangunan harus dipenuhi sehingga secara adil memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan generasi sekarang dan masa depan.
3. Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut serta kegiatan yang mempengaruhi masyarakat akan ilmu pengetahuan yang didasarkan untuk memahami proses dan sistem alam.
4. Menggunakan saham untuk menikmati sumber daya sehingga mendorongpada hal-hal yang merugikan harus dihindari atau diminimalkan.

5. Hubungan dasar antara pengelolaan berkelanjutan sumber daya pesisir dan laut, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan laut harus diakui.
6. Kemitraan multisektoral yang melibatkan LSM, sektor swasta, masyarakat, dan media massa, serta pemerintah, lembaga antar pemerintah, lembaga internasional dan lembaga keuangan bilateral dan multilateral, diakui sebagai mekanisme penting untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan.
7. Negara harus mengakui dan telah mendukung identitas, kebudayaan dan kepentingan penduduk asli dan komunitas mereka dan memungkinkan partisipasi efektif mereka dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan.
8. Isu lingkungan paling baik ditangani dengan partisipasi semua warga negara yang bersangkutan, pada tingkat yang relevan.
9. Hak-hak semua sektor masyarakat harus dihormati dan dilindungi.
10. Pendekatan yang berhubungan dengan kegiatan pencegahan harus banyak dilakukan. Dimana ada ancaman kerusakan permanen yang serius, kurangnya kepastian ilmiah tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menunda langkah-langkah efektif dalam proses pembiayaan untuk mencegah degradasi lingkungan.
11. Kegiatan dalam satu Negara seharusnya tidak menyebabkan kerusakan oleh pencemaran terhadap negara lain dan lingkungannya.

12. Keterkaitan antara konservasi dan pembangunan sosial ekonomi menyiratkan bahwa konservasi baik diperlukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan, dan pembangunan sosial ekonomi diperlukan untuk pencapaian konservasi secara abadi.
13. Ekosistem pendekatan berbasis manajemen harus diterapkan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir dan laut (PEMSEA, 2003).

3.2.1.3 *Strategic Action Statement* of SDS-SEA

Negara-negara di Asia Timur menyatakan komitmen dalam *Strategic Action Statement of SDS-SEA*, yakni:

1. Memastikan penggunaan yang berkelanjutan sumber daya pesisir dan laut.
2. Melestarikan spesies dan bidang lingkungan pesisir dan kelautan yang masih asli dengan metoda yang relevan terhadap sosial atau budaya.
3. Melindungi ekosistem, kesehatan manusia dan masyarakat dari risiko yang terjadi sebagai konsekuensi dari aktivitas manusia.
4. Mengembangkan kegiatan ekonomi di lingkungan pesisir dan laut yang berkontribusi terhadap kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial dan menjaga nilai-nilai ekologis.
5. Menerapkan instrumen internasional yang relevan dengan pengelolaan lingkungan pesisir dan kelautan.
6. Berkomunikasi dengan *stakeholders* untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat partisipasi multisektoral dan memperoleh

dukungan ilmuwan untuk pembangunan yang berkesinambungan di lingkungan pesisir dan laut (PEMSEA, 2003).

3.2.2 *Integrated Coastal Management* (ICM)

Strategi pembangunan berkelanjutan untuk wilayah perairan di Asia Timur (SDS-SEA) memiliki kerangka strategi yang berdasarkan pada Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa pada tentang Lingkungan dan Pembangunan (*United Nations Conference on Environment and Development-UNCED*) pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brasil dengan aksi globalnya yang dikenal dengan Agenda 21, khususnya Bab 17 tentang rencana aksi *"Protection of Oceans, All kind of Seas, Including Closed and Semi-Closed Seas, and Coastal Areas and the Protection, Rational Uses and Development Their Living Resources"* telah melahirkan kesepakatan bahwa menangani dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat multi dimensi (sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan) di wilayah pesisir, diperlukan suatu pendekatan yang bersifat menyeluruh (holistic) dan terpadu (integrated). Konsepsi pengelolaan dimaksud selanjutnya dikenal dengan *"Integrated Coastal Management (ICM)"*, sebagai paradigma yang komprehensif dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya wilayah pesisir untuk menjamin keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian lingkungan dan sumberdaya wilayah pesisir (Mapparesa, 2005: 7).

Adapun tujuan utama dari *Integrated Coastal Management*(ICM)ini menurut Ir. Alam Syah Mapparesa, M.Sc ialah sebagai sarana pelaksana dari pada

suatu konsep pembangunan berkelanjutan untuk menekan resiko atau kerentanan wilayah pesisir serta masyarakat berikut infrastruktur dan kegiatan sosial-ekonominya baik terhadap berbagai ancaman bencana alam (*natural hazard*), seperti badai gelombang (tsunami), erosi pantai dan banjir, maupun dari dampak negatif aktivitas sosial-ekonomi masyarakat (pembangunan) itu sendiri, serta untuk memelihara proses ekologi dasar, sistem pendukung kehidupan dan keanekaragaman hayati wilayah pesisir dan laut meliputi terumbu karang, rumput laut, padang lamun dan mangrove. ICM juga memiliki strategi untuk mencapai tujuan utama tersebut, antara lain:

1. Penguatan dan penajaman pemahaman yang menyeluruh atas sistem sumber daya alam wilayah peisir yang unik dan bernilai tinggi bagi pengembangan wilayah dan keberlanjutannya dalam konteks aktivitas manusia (Pembangunan) yang lebih luas;
2. Penentuan secara tepat dan bijak multi pemanfaatan sistem sumber daya wilayah pesisir melalui integrasi informasi dan pertimbangan atas aspek ekologis, sosial dan ekonomi;
3. Promosi pendekatan secara lintas disiplin ilmu serta kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan yang kompleks, serta menyusun strategi yang terpadu untuk perluasan dan diversifikasi kegiatan ekonomi;
4. Peningkatan kapasitas pusat dan daerah dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas investasi, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam

dan manusia untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan wilayah pesisir.

Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi utama Pengelolaan Pesisir Terpadu antara lain:

1. Perencanaan Kawasan, rencana bagi pemanfaatan wilayah pesisir dan laut masa kini dan mendatang, memberikan visi jangka panjang.
2. Promosi Pengembangan Ekonomi, promosi pemanfaatan wilayah pesisir dan laut; pelestarian keanekaragaman hayati; jaminan keberlanjutan pemanfaatan.
3. Pengawasan dan Perlindungan Sumberdaya, perlindungan basis ekologis wilayah pesisir dan laut; pelestarian keanekaragaman hayati; jaminan keberlanjutan pemanfaatan.
4. Penyelesaian Konflik, harmonisasi dan keseimbangan antara pemanfaatan saat ini dan potensi pemanfaatan kedepan; penyelesaian konflik antar pengguna wilayah pesisir dan laut.
5. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Masyarakat, perlindungan keselamatan dan keselamatan masyarakat wilayah pesisir dan laut terhadap bahaya alamiah maupun akibat aktifitas manusia, serta dari konsumsi sumberdaya pesisir (Mapparesa, 2005: 7).

Oleh karena itu sebagai implementasi dari SDS-SEA tersebut PEMSEA lahir untuk menggalakkan program *Integrated Coastal Management* (ICM) di wilayah Asia Timur untuk bersama-sama mengelola wilayah pesisir dengan sistem pengelolaan yang terintegrasi secara menyeluruh. Baik itu mengenai

pengelolaan sumberdaya laut yang berdampak langsung pada perekonomian negara ataupun dalam pengendalian kerusakan ekosistem laut. Manajemen yang diberikan melalui ICM ini mencakup seluruh aktivitas yang bersinggungan langsung dengan wilayah perairan laut dan pesisir berupa perlindungan keanekaragaman hayati laut,

3.2.3 Sejarah Perkembangan PEMSEA dalam Isu Lingkungan Hidup untuk Wilayah Perairan Asia Timur

Berawal sejak dari intervensi*Global Environment Facility* (GEF) sebuah lembaga independen yang bergerak dalam pendanaan untuk kegiatan atau projek di bidang lingkungan hidup pada Desember 1993, ketika proyek air internasional yang pertama diluncurkan oleh GEF di wilayah Asia Timur dengan fokus utama pada pencegahan dan pengelolaan pencemaran laut dengan mendirikan situs terpadu pengelolaan pesisir percontohan di Xiamen,Cina dan di Batangas Bay, Filipina; juga berupaya memobilisasi subregional yang masih berhubungan dengan wilayah perairan Asia Timur (Indonesia, Malaysia dan Singapura) untuk mengatasi masalah pencemaran laut di Selat Malaka dan Selat Singapura, dan memperkuat pembangunan kapasitas, terutama di negara berkembang seperti Kamboja, Cina, Korea, Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam (diakses dari http://beta.pemsea.org/about-pemsea/history pada 5 Mei 2012 pukul 19.35 Wib).

Proyek yang kemudian dikenal sebagai Pencegahan dan Pengelolaan Pencemaran Laut di kawasan Perairan Asia Timur diadakan oleh*United Nations Development Programme* (UNDP) dan*International Maritime Organization*

(IMO), dan saat ituNegara Filipina yang menjadi tuan rumah atas proyek tersebut di Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam di Quezon City, Metro Manila- Filipina.

Berhasil menyelesaikan proyek tahap uji coba pada bulan September 1999 menyebabkan pembangunan kepercayaan dan pengakuan akan kebutuhan untuk mengembangkan kemitraan antar *stakeholder* dalam mengatasi tantangan lingkungan hidup yang makin besar di wilayah perairan Asia Timur yang ternyata juga banyak dirasakan oleh beberapa negara yang terhubung langsung dengan wilayah perairan Asia Timur. Sebuah proyek tahap kedua tahun 1999 berfokus pada membangun kemitraan antar pemerintah dan multisektoral dalam pengelolaan lingkungan hidup ini didukung kembali oleh *Global Environment Facility* (GEF), dengan awal pelaksanaan pada bulan Oktober 1999. Sebagai tambahan atas proyek yang baru ini adalah muncul gagasan baru untuk membangun sebuah kemitraan antar negara yang memiliki keterhubungan laut di wilayah Asia Timur dalam pengelolaan laut, maka dibentuklah*Partnerships in Environmental Management for Seas East Asia* (PEMSEA) sebagai bentuk kemitraan yang hadir untuk mewakili inisiatif proyek baru dalam mengatasi permasalahan lingkungan di wilayah perairan di Asia Timur sebagai program regional *International Maritime Organization* (IMO).

Fokus utama dari proyek PEMSEA antara lain:Perumusan dan penerapan pendekatan terpadu untuk mengelola penggunaan lahan dan air, dari aliran sungai ke laut pesisir, menanggapi tantangan perubahan iklim, naiknya volume air laut, krisis keanekaragaman hayati; perikanan dan sumber daya laut lainnya, degradasi

kualitas air , dankonflik sosial yang terjadi di wilayah pesisir dan laut (diakses dari http://beta.pemsea.org/about-pemsea/history pada 5 Mei 2012 pukul 19.35 Wib).

Dengan keberhasilan proyek tahun 1999 dan menjalin kemitraan pada tahun yang sama yang diikuti oleh 11 negara PEMSEA (Brunei Darussalam, Kamboja, Cina, Korea Selatan, Korea Utara, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam),Setahun kemudian, Juli 2000 di Dalian, kesebelas negara tersebut mulai menyiapkan sebuah kerangka strategi berdasarkan konsep strategi pembangunan berkelanjutan untuk wilayah perairan Asia Timur.

Pada bulan Maret 2002 saat *Intergovernmental Meeting* of PEMSEA diadakan kembali, negara Jepang masuk sebagai anggota baru yang menambah kekuatan baru dalam kemitraan PEMSEA. Sehingga dalam kurun waktu tiga tahun dari persiapan yang dilakukan di tahun 2000, melalui Deklarasi Putra Jaya tahun 2003 di Malaysia akhirnya *Sustainable Development Strategy for Seas of East Asia* (SDS-SEA) lahir dan mejadi pedoman bersama untuk menjalankan program kemitraan untuk wilayah perairan Asia Timur.

Pada tahun 2006 melalui *Haikou Partnerships Agreement*, PEMSEA mengadakan perumusan kembali untuk memperkuat jalinan kerjasama dengan bersama-sama membangun program-program yang komprehensif dan terintegrasi secara menyeluruh untuk pengelolaan pesisir dan laut di wilayah perairan Asia Timur berdasarkan kerangka SDS-SEA di tahun 2003 dengan sebelas negara yang berada dalam kawasan perairan Asia Timur termasuk Jepang dan Timor Leste.

Selama interaksi dan pertemuan yang dilakukan oleh sebelas negara anggota mulai dari tahun 1993 hingga tahun 2006 sebagai sebuah kemitraan regional yang masih belum memiliki *legal personality* sebagai organisasi internasional akhirnya di tahun 2009 PEMSEA bertransformasi menjadi sebuah lembaga yang akhirnya memiliki *legal personality* sebagai bukti keabsahan dalam menjalankan programnya setelah selama 16 tahun berkecimpung dalam pengelolaan pesisir dan laut di kawasan Asia Timur.

Dalam kinerjanya yang mengacu pada SDS-SEA, PEMSEA menjalankan program *Integrated Coastal Management* (ICM) sebagai pendekatan sistematis dan efektif untuk mengelola penggunaan lahan dan air di wilayah pesisir, *scaling up* dari ICM, pengembangan serta penerapan mekanisme daerah yang berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen nasional dan regional untuk melindungi dan mengelola lingkungan pesisir dan laut dari Laut Asia Timur sebagai implementasi dari SDS-SEA(diakses dari http://beta.pemsea.org/about-pemsea/history pada 5 Mei 2012 pukul 19.35 Wib).

3.2.4 Kronologis Bergabungnya Indonesia dalam PEMSEA

Indonesia sebenarnya telah terlibat aktif dalam forum internasional bersama negara-negara yang memiliki keterhubungan dengan wilayah perairan Asia Timur sejak tahun 1993 dalam pengelolaan pencemaran laut di Selat Malaka dengan mengutarakan masalah ini hanya pada forum-forum informal kepada tiap-tiap negara di wilayah Asia Timur. Ternyata respon dari tiap-tiap negara di wilayah Asia Timur juga merasakan hal yang sama terhadap pengelolaan wilayah

laut yang sifatnya *transboundary*, tidak dapat diatasi oleh negara sendiri melainkan harus dan lebih efektif jika melibatkan negara-negara tetangga yang sama-sama memiliki kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut.

Indonesia bergabung dengan PEMSEA diawali dengan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam bidang lingkungan wilayah pesisir dan laut seperti pencemaran, hasil tangkapan ikan yang menurun, degradasi habitat dll. Indonesia menyadari betul akan sebuah kerjasama Internasional mengingat wilayah perairan merupakan *transboundary* yang tidak mungkin diselesaikan oleh satu negara.

Indonesia sebelum tergabung dalam PEMSEA juga ikut serta dalam forum internasional bidang kelautan di wilayah regional Asia Tenggara, *ASEAN Working Group for Coastal and Marine* (AWGCM). Akan tetapi saat itu ASEAN hanya memiliki sepuluh negara saja dan wilayahnya secara geografis ternyata memiliki kaitan dengan wilayah lain misalkan dengan negara-negara di Asia Timur: Jepang, Cina, Korea. Hal ini sering menjadi pembahasan dalam pertemuan-pertemuan di ASEAN sehingga muncul inisiatif untuk membentuk kerjasama yang lebih luas. Sehingga muncul PEMSEA ini sebagai gagasan wadah Internasional yang cakupannya lebih luas. Atas pertimbangan perekonomian di negara-negara Asia Timur sangat mapan dibandingkan dengan negara-negara lainnya, region ini juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan tiap tahunnya.

Dalam hal ini dapat menjadi pertimbangan perwakilan negara-negara tersebut yang memiliki inisatif bergabung dalam PEMSEA melihat pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan konsep Pembangunan Berkelanjutan yang

apabila diabaikan akan rentan dan dapat menjadi ancaman bagi lingkungan, salah satunya di wilayah laut dan pesisir. Dan jika hal itu terus dibiarkan maka permasalahan perekonomian juga akan meningkat. Dan ini harus segara diantisipasi segera dan dikelola supaya permasalahan ini tidak membesar.

Maka dari itu berkumpul para wakil dari tiap-tiap negara yang memiliki kepentingan yang sama dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut untuk membahas tentang bagaimana konsep pembangunan berkelanjutan untuk pesisir dan laut di kawasan Asia Timur(Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2012).

Hingga pada akhir nya bergabungnya Indonesia dan negara-negara di Asia Timur lainnya merumuskan dalam Deklarasi Putrajaya tahun 2002 di Malaysia untuk membawa masalah ini ke forum formal agar memiliki *legacy* dan dapat berjalan dengan optimal. Pada saat itu*Parterships in Environmental Management for Seas East Asia* (PEMSEA) terbentuk dengan bantuan dari *International Maritime Organization* (IMO), *Global Environmental Facility* (GEF), *United Nation Development Programme* (UNDP). Akan tetapi saat itu PEMSEA masih dalam program regional *International Maritime Organization* (IMO) yang mengkhususkan pembahasan mengenai masalah . Mulai saat itu Indonesia terlibat aktif dalam kegiatan PEMSEA, termasuk dalam turut serta dalammengimplementasikan SDS-SEA yang memiliki ICM sebagai bentuk program yang harus digalakkan di Negara Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2012).

3.2.4.1 Implementasi *Sustainable Development Strategy for The Seas of East Asia* (SDS-SEA) di Indonesia

Indonesia telah mengimplementasikan konsep pembangunan berkelanjutan dalam bentuk produk hukum. Berikut bentuk implementasi SDS-SEA di Indonesia yang penulis sajikan melalui tabel berikut:

Tabel. 3.1***Indonesia's Contribution to the Implementation of the Sustainable Development Strategy for the Seas of East Asia(2003-2011)***

SDS-SEA related Legislation, Policies and Plans	
Coastal and Water Resources Management	1. *Act No.7/2004 on integrated water resources management at the basin level* 2. *Act No. 32/2004 on decentralization of authorities and responsibilities in coastal and marine management* 3. *Act No.27/2007 concerning management of coastal zones and small islands provides the framework*
Development and Spatial Planning	1. *NA. 25/2005 (The Development Plan Act) provides a systematic process of development planning and preparing multi-year action plans from the district, to the provincial and national level.* 2. *NA Nos. 32 and 33/2004 on development and management of province and districts.* 3. *National Act (NA) No.26/2007 on Spatial Planning, including coastal and marine areas.*
Biodiversity and Habitat Protection	1. *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP, 2003) guides the implementation of national biodiversity program until 2020* 2. *Presidential Instruction No.16/2005 supporting the development of marine tourism and enhancing management and control of National Marine Park sustainability*

	3. *Biodiversity Basic Law (2008).*
Fisheries	1. *Fisheries law No. 31/2004* 2. *Government regulation No.60/2008 on fish conservation* 3. *NA No. 45/2009 on Fisheries Management*
Pollution Reduction and Waste Management	1. *Ministerial Decree No.51 on Seawater Quality Standard (2004)* 2. *Ministerial Decree No.75 on Organization and Management of National Cleaner Production Center (2004)* 3. *Municipal Solid Management Law No.18/2008* 4. *National Act No.32/2009 Environmental Control and Management*
Climate Change and Disaster Risk Reduction	1. *Law No.24/2007 on Disaster Management* 2. *Law No.32/2009 on environmental protection and management gives high priority to the mitigation and adaptation to the effects of climate change* 3. *National Council for Climate Change (2008)* 4. *Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) 2010* 5. *National Plan for Disaster and Management 2010-2014* 6. *National Plan for Disaster and Risk Reduction 2010-2012*
Information and Public Awareness	1. *Walhi, WWF, COREMAP etc* 2. *National Biodiversity Networks collaboration between LIPI, Universities and BAKOSURTANAL.* 3. *National Universities Networks in Fisheries and Marine Sciences (F2PT) involving 63 universities in Indonesia* 4. *Coastal Management and Fisheries Journalist Network* 5. *Etc*
ICM implementation	1. *Demonstration Site: Bali Province (2000)* 2. *Parralel Site: Sukabumi Regency (2003) and Jakarta Bay* 3. *Law: NA 27/2007 on coastal and small islands management, NA 32/2009 on environmental protection and control, NA 32/2004 for coastal resource management* 4. *Projects:COREMAP, MCRMP, BOBLME, ATSEA, and CTI.*

(sumber: PEMSEA, 2012)

SDSSEA merupakan konsep pembangunan berkelanjutan yangdibentuk bersama oleh para anggota PEMSEA untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah perairan Asia Timur. Strategi Pembangunan Berkelanjutan adalah paket prinsip-prinsip yang berlaku, relevan dengan program aksi di tingkat regional dan internasional, instrumen perjanjian, serta implementasi pendekatan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di wilayah perairan Asia Timur.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota PEMSEA yang menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan SDSSEA melalui produk hukum karena produk hukum merupakan instrumen negara untuk mengatur tata kelola pembangunan negara agar tercapai tujuan bersama.

3.2.5 Visi, Misi dan Prinsip PEMSEA

Sebagai mekanisme koordinasi regional untuk implementasi Strategi Pembangunan Berkelanjutan untuk Asia Timur Laut atau Sustainable *Development Strategy for Seas East Asia* (SDS-SEA), PEMSEA diatur oleh mekanisme kemitraan regional, Dewan Kemitraan untuk wilayah perairan Asia Timur atau disebut juga sebagai *East Asia Seas* (EAS) *Council*, yang terdiri dari Negara Anggota (*State members*) dari daerah tersebut, juga sebagai Anggota Non-Negara (*Non-Country members*) dari sektor yang berbeda.*Partnerships in the Environmental Management for Seas East Asia* (PEMSEA) berlangganan dan saham visi dari SDS-SEA, yang merupakan pencapaian sistem sumber daya yang

berkelanjutan dari Laut Asia Timur sebagai warisan alam bagi masyarakat di wilayah ini, media akses ke pasar regional dan global, dan rangkaian pengaman untuk persediaan makanan sehat, penghidupan, kemakmuran ekonomi dan kerjasama eksistensi yang harmonis untuk generasi sekarang dan mendatang(diakses dari http://beta.pemsea.org/about-pemsea/vision pada 5 Mei 2012 pukul 19.35 Wib).

Memenuhi visi bersama ini bukanlah tugas yang mudah. Ini akan memakan waktu, strategi dan sumber daya untuk menerapkan satu set program aksi, dan akan memerlukan kehendak kolektif dan kerja sama regional antara pemerintah terkait dan stakeholder lainnya untuk menerapkannya. Untuk bagiannya, PEMSEA bergerak maju untuk berkembang menjadi organisasi mandiri internasional yang mengkhususkan diri dalam laut dan pesisir terpadu manajemen, mendukung kebutuhan negara untuk pembangunan yang berkesinambungan dari pantai dan lautan di wilayah perairan Asia Timur dengan menggabungkan keterampilan, pengetahuan dan jasa melalui jaringan kolaborati dan pemangku kepentingan lainnya(diakses dari http://beta.pemsea.org/about-pemsea/vision pada 5 Mei 2012 pukul 19.35 Wib).

Mendukung Misi dan Prinsip PEMSEA bertujuan secara proaktif untuk membangun kemitraan antar pemerintah dan antar sektor yang efektif dan memperluas kapasitas negara-negara dan stakeholder lainnya dengan inovatif, lintas sektor kebijakan, alat dan jasa di pesisir terpadu dan laut. Satu dengan misi dari SDS-SEA, itu menegaskan tujuan dan fungsi dari para pemangku kepentingan untuk satu tujuan bersama.

PEMSEA berkomitmen untuk prinsip-prinsip inti beberapa dan nilai-nilai berdasarkan SDS-SEA, Deklarasi Putrajaya, Haikou*Agreement*, Deklarasi Manila, Milenium PBB dan Deklarasi *World Summit on Sustainable Development* untuk Pengelolaan Pesisir dan Laut.

Partisipasi dalam SDS-SEA pelaksanaan oleh semua negara di wilayah ini serta *stakeholder* lainnya, dalam kapasitas masing-masing dan sumber daya, sebagai kunci untuk menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan dari Laut Asia Timur.

Kemitraan sebagai mekanisme yang efektif untuk memfasilitasi aksi bersama dalam suatu usaha bersama untuk melaksanakan SDS-SEA, dengan mempertimbangkan inisiatif, tanggung jawab bersama, hasil yang diinginkan, peran saling mendukung, dan kebutuhan untuk mengatasi kesenjangan dalam kapasitas antara negara-negara yang bersangkutan dan pemangku kepentingan lainnya.

Koordinasi dan pemberian bimbingan teknis dan bantuan kepada negara dan tujuan yang ditargetkan mereka perkembangan, melalui jangka panjang pengembangan kapasitas usaha dan on-tanah-perencanaan dan pelaksanaan terpadu pesisir dan program pengelolaan laut.

Kerjasama dengan proyek-proyek bilateral dan multilateral dan program di tingkat daerah sub-regional, negara dan lokal, bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan memecahkan masalah dan kekurangan di laut dan pesisir pemerintahan, dalam mendukung target dan tujuan bersama(diakses dari http://beta.pemsea.org/about-pemsea/vision pada 5 Mei 2012 pukul 19.35 Wib).

3.2.6 Struktur dan Mekanisme Organisasi

Sebagai sebuah organisasi internasional PEMSEA memiliki struktur organisasi dalam mencapai tujuannya. PEMSEA memiliki*Executive Director* yang bernama Prof. Raphael P.M. Lotilla yang kemudian dibantu oleh para staff dan karyawan lainnya yang mengisi posisi strategis organisasi pada umumnya. Disamping itu Executive Director bekerja untuk mengawasi jalannya mekanisme organisasi.

Menyadari pentingnya dan urgensi dalam mengatasi tantangan lingkungan dan bergerak menuju pembangunan berkelanjutan wilayah perairan di Asia Timur, tahun 2006 melalui *Haikou Partnership Agreement*,PEMSEAdidirikan sebagai mekanisme wilayah koordinasi untuk pelaksanaan Strategi Pembangunan Berkelanjutan (SDS -SEA)(diakses dari http://beta.pemsea.org/about-pemsea/operating-mechanisms pada 5 Mei 2012 pukul 19.35 Wib).

Berdasarkan *Haikou Partnership Agreement* tersebut, PEMSEA melaksanakan mandat melalui empat mekanisme operasi:

a. *East Asian Seas (EAS) Congress*

   Diadakan setiap tiga tahun sekali, *EAS Congress* berfungsi sebagai alat untuk para anggota, intelektual, *stakeholders* dan para kolaborator untuk berbagi pengetahuan dan memantau kemajuan daripada SDS-SEA. Di dalam acara Kongres terdapat juga Forum Menteri dan Konferensi Internasional. Forum Menteri adalah tempat untuk memberikan arah kebijakan dan komitmen terkait dengan pelaksanaan SDS-SEA, sedangkan Konferensi Internasional melakukan kegiatan pertukaran pengetahuan dan

diskusi yang ditargetkan pada isu sektor-sektor tertentu; mempromosikan program serta berbagai mekanisme yang mendorong ketertarikan pelaku bisnis.

b. *East Asian Seas (EAS) Partnership Council*

EAS Partnership Council adalah badan reguler yang menyediakan kebijakan dan pedoman operasional untuk kemajuan pelaksanaan SDS-SEA. *EAS Partnership Council* mengarahkan, memantau dan mengkaji arah yang sedang berlangsung dari pelaksanaan SDS-SEA.

c. *The PEMSEA Resource Facility* (PRF)

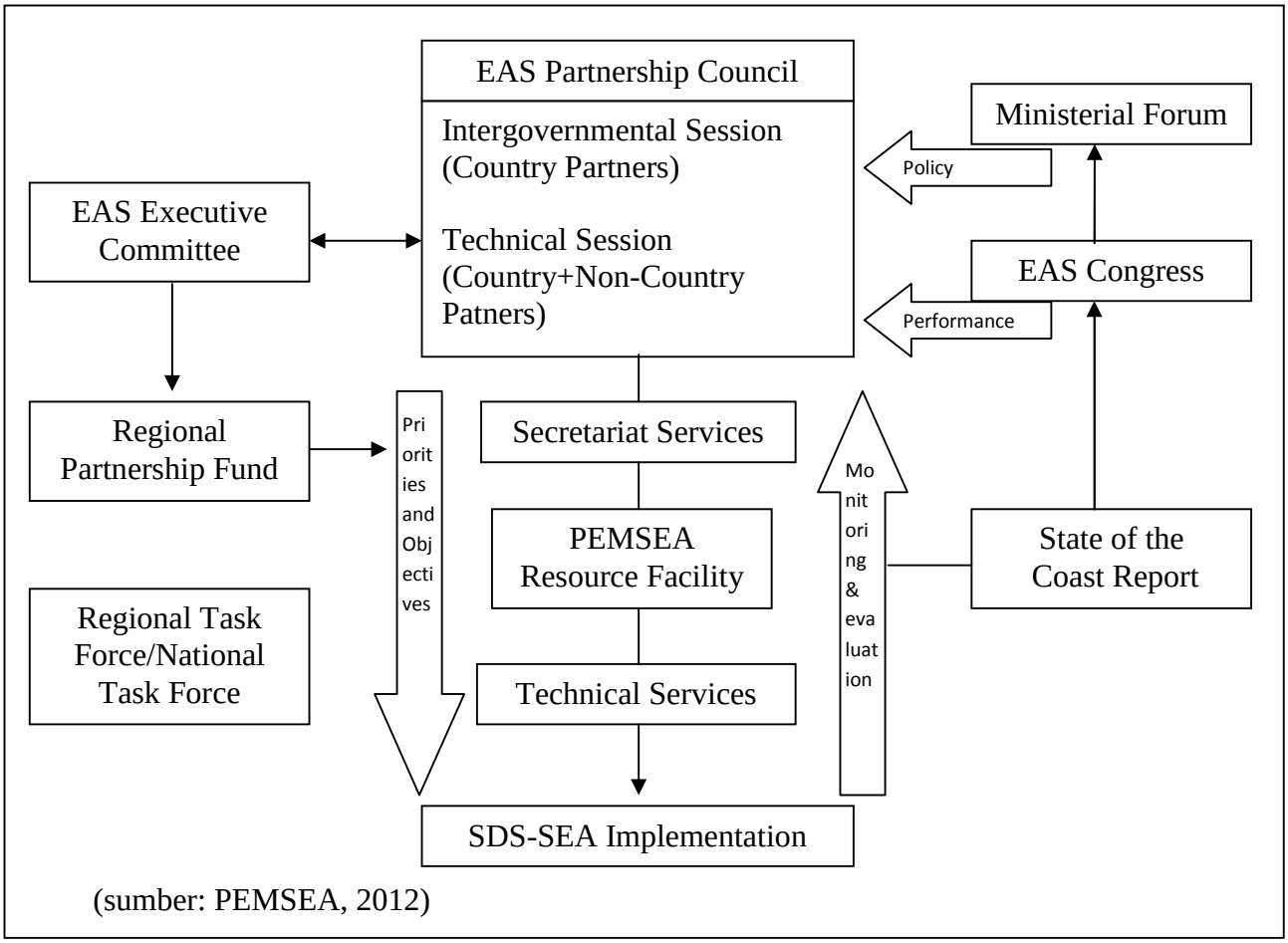
PRF memiliki dua tugas dalam menjalankan organisasi.*Pertama,Secretariat Services*, mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan, keputusan Organisasi dalam EAS Congress, pemantauan dan pelaporanimplementasi SDS-SEA.*Kedua, Technical Support Services,* Layanan dukungan teknis untuk negara anggota PEMSEA, termasuk memberikan dan memobilisasi saran, kebijakan, pengembangan kapasitas dan dukungan teknis untuk tata kelola pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir dan laut. Ketua PRF bertugas mengawasi jalannya tugas *Secretariat Services* dan *Technical Support services*.

d. *Regional Partnership Fund*

Bertugas untuk mencari channel dan memastikan penggunaan dana untuk hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan organisasi yang berasal dari sumbangan sukarela dari negara-negara yang berkepentingan, lembaga

donatur, dan individu untuk implementasi SDS-SEA(diakses dari http://beta.pemsea.org/about-pemsea/operating-mechanisms pada 5 Mei 2012 pukul 19.35 Wib).

Bagan 3.1 ***PEMSEA Coordinating Mechanism Organization Chart***



(sumber: PEMSEA, 2012)

3.2.7 Sumber Daya yang Dimiliki PEMSEA

The PEMSEA Resource Facility (PRF) adalah sumber daya fasilitas yang mandiri yang dimiliki oleh negara anggota PEMSEA untuk memberikan layanan yang bernilai tambah dalam membantu pembangunan berkelanjutan dan

pengelolaan Laut di Asia Timur(diakses dari http://beta.pemsea.org/about-pemsea/prf pada 5 Mei 2012 pukul 19.35 Wib).

Hal ini untuk memobilisasi sumber daya, produk dan jasa dalam mendukung implementasi SDS-SEA, melalui kemitraan antar pemerintah dan multi-sektoral. Fungsi utamanya mencakup: Menyediakan Jasa Sekretariat ke *East Asian Seas* (EAS) *Council*dan Komite Eksekutif dalam menyediakan Layanan Teknis untuk *Country Partnership* dan *Non-Country Partnership* untuk pelaksanaan SDS-SEA PRF ini dipimpin oleh *Executive Director*, yang mengelola dan mengkoordinasikan kerja dari Sekretariat dan Pelayanan Teknis, terutama dalam menanggapi keputusan EAS *Council* dan Komite Eksekutif.

Pendanaan untuk Sekretariat PRF, sebagian, berasal dari sumbangan sukarela dari China, Jepang dan Korea Selatan, sedangkan PRF Layanan Teknis pendanaan berasal dari proyek-proyek yang disponsori dan program, terutama Proyek GEF / UNDP / UNOPS pada Pelaksanaan SDS-SEA(diakses dari http://beta.pemsea.org/about-pemsea/prf pada 5 Mei 2012 pukul 19.35 Wib).

1. *Reengineering PRF*

   Transformasi terbaru PEMSEA untuk sebuah organisasi internasional dengan status hukum kini telah menyediakan PRF dengan kapasitas untuk membuat kontrak dengan pihak ketiga, menerima sumbangan dan mendapatkan properti. Selain itu, perjanjian tertunda antara Pemerintah Filipina dan PEMSEA menyiratkan perubahan aturan hukum dan administratif dan persyaratan tentang petugas PEMSEA dan perwakilan, serta personil PRF dan operasi. Ada juga kebutuhan untuk PRF untuk

memenuhi harapan tumbuh Mitra, dan untuk mengatasi stabilitas keuangannya.

2. Diskusi dan pertukaran ide-ide

   Saat ini sedang berlangsung untuk formulasi rencana strategis untuk merekayasa ulang PRF pada pertengahan 2011. Maksud dari keseluruhan proses adalah membuat PRF secara signifikan lebih fleksibel, responsif, efisien dan efektif untuk mitra, karyawan dan stakeholder lainnya(diakses dari http://beta.pemsea.org/about-pemsea/prf/structurepada 5 Mei 2012 pukul 19.35 Wib).

3.2.7.1 Kemampuan Finansial *(Fund Raising)*

Kemampuan Finansial PEMSEA saat ini selain ditopang oleh dana usaha organisasi berupa anggaran sukarela dari tiap-tiap negara anggota yang tidak ditentukan jumlah besarnya yang dihimpun dalam setahun sekali yang nantinya dipergunakan dalam penyelenggaraan EAS *Congress* yang diadakan tiga tahun sekali. PEMSEA juga masih menerima bantuan dana dari *Global Environmental Facility* (GEF), *International Maritime Organization* (IMO) dan *United Nation Development Programme* (UNDP) (PEMSEA, 2003).

3.2.8 Jaringan Komunikasi Internasional dan Sistem Informasi PEMSEA

Mekanisme koordinasi wilayah yang dilakukan oleh negara-negara anggota merupakan pendekatan yang unik dan inovatif untuk pengelolaan laut. Mekanisme ini tidak mengikat secara hukum, seperti halnya dengan konvensi regional. Sebaliknya, hal tersebut itu merupakan suatu pengaturan didirikan yang mengacu pada prinsip-prinsip keanggotaan, dan didedikasikan untuk pencapaian visi bersama dan tujuan dari SDS-SEA.

Dalam mekanisme sistem komunikasi dan informasi antar anggota, PEMSEA memiliki dua kategori keanggotaan yakni *Country Partners* dan *Non-Country Partners*. Masing-masingnya memiliki mekanisme sistem komunikasi dan informasi yang berbeda namun tetap mengkerucut pada satu tujuan yaitu bersama-sama mengimplementasikan SDS-SEA dengan menggalakkan program *Integrated Coastal Management* (ICM) (PEMSEA, 2003).

3.2.8.1 *Country Partners*

Keanggotaan dalam *Country Partners* merupakan negara-negara yang berada dalam wilayah perairan Asia Timur yang langsung memilki keterhubungan dengan wilayah perairan Asia Timur baik langsung maupun tidak langsung yang diresmikan pada tahun 2002 saat Deklarasi Putra Jaya di Malaysia. Saat ini terdapat 11 negara yang tergabung dalam *Country Partners* antara lain (Brunei Darussalam, Kamboja, Cina, Korea Selatan, Korea Utara, Indonesia, Filipina, Jepang, Timor Leste, Laos dan Vietnam). Tiap-tiap negara yang tergabung dalam keanggotaan *Country Partners* memiliki *National Focal Point* yaitu Representatif

negara anggota sebagai pusat informasi mengenai PEMSEA di negaranya yang biasanya di dudukkan pada kantor Pemerintahan pusat suatu negara. Untuk di Indonesia *National Focal Point ofPEMSEA* adalah Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (PEMSEA, 2003).

3.2.8.2 *Non-Country Partners*

Non-Country Partners merupakan keanggotaan yang mendukung, mensponsori dan ikut berperan aktif dalam mengimplementasikan SDS-SEA. Keanggotaannya dari berbagai macam latar belakang seperti Organisasi Internasional, LSM, ilmuwan, lembaga donatur keuangan dll yang serta merta mendukung dalam implementasi SDS-SEA yang selanjutnya dapat disebut sebagai *PEMSEA Network Local Governments* (PNLG) (PEMSEA, 2003).

3.2.8.2.1 PEMSEA Network Local Governments (PNLG)

Berdasarkan *Charter of the PEMSEA Network Local Governments for Sustainable Coastal Development* tahun 2005 PNLG sebelumnya bernama *Regional Network of Local Government* (RNLG) hingga pada akhirnya diubah menjadi *PEMSEA Network Local Governments* (PNLG) dalam "*Bali Resolution on the Establishment of the PEMSEA Network of Local Governments for Sustainable Coastal Development"* pada 27 April 2005 di Bali, Indonesia.

Berdasarkan *Charter* PNLG, PNLG memilki visi:

"*Coastal areas throughout the East Asian Seas Region are managed in sustainable manner"* (Charter of PNLG, 2005: Chapter II). Dan misi:

"The PNLG's mission shall be to serve as a network of local governmentin the region, which, along with their stakeholders, shall promote the application of ICM as an effective management framework to achieve sustainable coastal development" (Charter of PNLG, 2005: Chapter II).

PNLG sebagai bagian dari PEMSEA juga memiliki mekanisme organisasi tersendiri yang tertuang dalam *Charter of PEMSEA Network Local Governments* tahun 2005 yang menjabarkan bahwa keanggotaan PNLG merupakan anggota yang juga bertanggung jawab mengemban visi dan misi PEMSEA untuk imlplementasi SDS-SEA. Segala bentuk peraturan dalam PNLG telah diatur dan disepakati bersama oleh anggota PNLG dalam *Charter of* PNLG (PEMSEA, 2003).

3.3 PEMSEA *Network Local Government* (PNLG) di Indonesia

Integrated Coastal Management (ICM) sebagai salah satu program yang dilahirkan dari SDS-SEA. Secara singkat ICMdapat didefinisikan sebagai sistem manajemen sumberdaya alamdan lingkunganyang mempekerjakan melalui pendekatan integratifholistik danprosesperencanaaninteraktifdalam mengatasimasalahmanajemen yang kompleksdi daerahpesisir dan laut. Baik itu mengenai pengelolaan sumberdaya laut yang berdampak langsung pada perekonomian negara ataupun dalam pengendalian kerusakan ekosistem laut. Manajemen yang diberikan melalui ICM ini mencakup seluruh aktivitas yang bersinggungan langsung dengan wilayah perairan laut dan pesisir termasuk terumbu karang.

Pelaksanaan ICM di Indonesia dalam kerangka PEMSEA telah terapkan di tiga wilayah di Indonesia yakni Bali, Jakarta dan Sukabumi yang merupakan bagian daripada PNLG. Saat ini di Indonesia baru tiga wilayah tersebut yang menggunakan Pengelolaan Pesisir Terpadu (ICM), hal ini dikarenakan ingin fokus pada titik-titik yang memang terjadi banyak kerusakan dan memerlukan pengelolaan pesisir secara terpadu (PEMSEA, 2003).

3.3.1 *PEMSEA Network Local Government*Provinsi Bali

Pulau indah Bali, Indonesia adalah salah satu tujuan terkemuka di dunia wisata. Tempat yang indah, habitat laut yang beraneka ragam, spesies unik, orang yang ramah dan tradisi dijaga tidak pernah berhenti untuk memikat pengunjung. Pertumbuhan spektakuler dari industri pariwisata dan cahaya telah mengakibatkan degradasi beberapa sumber daya pesisir khususnya di wilayah Tenggara. Jika laju pembangunan ekonomi dan peningkatan populasi manusia tidak dikelola dengan baik, ini dapat merugikan keberlangsungan budaya dan ekologi. Oleh karena itu, bercita-cita untuk pengelolaan terpadu wilayah Tenggara Bali pesisir dan laut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melindungi lingkungan berdasarkan prinsip Tri Hita Karana. Adopsi prinsip seperti keseimbangan antara manusia, alam dan Tuhan benar-benar membuat situs ICM menjadi unik (PEMSEA, 2003).

3.3.2 *PEMSEA Network Local Government* (PNLG) Provinsi DKI Jakarta

Hingga saat ini belum terdapat data yang detail mengenai ICM di Teluk Jakarta. Peneliti hanya mendapatkan informasi mengenai dua provinsi di wilayah

teluk Jakarta (Jakarta dan Banten) telah mengadopsi ICM sejak tahun 2010 yang fokus kepada pereduksian polusi di wilayah Jakarta Selatan (Regional Review Of SDS-SEA 2003-2011, 2012: 62).

3.3.3 *PEMSEA Network Local Government* (PNLG) Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat

Kabupaten Sukabumi terletak di provinsi Jawa Barat di pantai selatan Pulau Jawa, sekitar 170km dari ibukota Indonesia, Jakarta. Ini adalah bagian dari kawasan ekonomi berkembang pesat dari Jakarta dan kota-kota serta kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Diberkati dengan keajaiban alam seperti gunung, sungai, pantai dan Teluk indah yang berdekatan dari Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi menyadari potensi besar dari daerah tersebut dan berkomitmen untuk mengejar perkembangan ekonomi kota maritim melalui pengembangan wisata pantai, perikanan dan lainnya terkait dengan layanan dan industri.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi, pada saat yang sama, mengakui potensi ancaman terhadap keseimbangan ekologi daerah pesisir-sebagai akibat dari polusi, degradasi habitat, erosi pantai dan sedimentasi-sebagai tantangan lingkungan, selain beberapa masalah manajemen seperti konflik dan kurangnya perencanaan lingkungan terpadu. Sejalan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan jangka panjang pesisir dan laut (yaitu, "Melindungi sistem penyangga kehidupan dan sumber daya pesisir dan konservasi laut untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Sukabumi") Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyadari pentingnya menerapkan pendekatan terpadu dalam

penggunaan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Sebagai langkah ke depan, pada tanggal 24 Februari 2003, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menandatangani Nota Kesepakatan dengan *International Maritime Organization* (IMO), melalui *Global Environment Facility (GEF)* / *United Nation Development Programme* (UNDP*)/ International Maritime Organization*(IMO) sama-sama membangun sebuah wadah kemitraan di linngkungan negara-negara yang langsung terhuhung kepada perairan Asia Timur dalam *Partnerships in Environmental Management For Seas East Asia* (PEMSEA), untuk sebuah pengelolaan pesisir terpadu (ICM) dalam *PEMSEA Network Local Government* (PNLG).

Kabupaten mengakuinya dengan sebutan ICM sebagai situs paralel yang sangat penting dan strategis dalam mendukung dan memungkinkan Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai manajemen pesisir dan laut dengan visi nya: "Palabuhanratu adalah mandiri, maritim, kota beradab dengan wisata pantai kelas dunia yang berkembang dan berkelanjutan dalam bidang perikanan dan industri".

3.3.3.1 Kronologis bergabungnya Kabupaten Sukabumi dalam *PEMSEA Network Local Governments* (PNLG)

Kabupaten Sukabumi bergabung dalam PNLG karena melihat bahwa potensi untuk mengembangkan pengelolaan pesisir terpadu dalam wadah internasional sangat membantu untuk pengelolaan wilayah pesisir kabupaten Sukabumi. Hal tersebut bermula ketika Kementerian Lingkungan Hidup di tahun

2002 (saat itu masih sebagai Departemen Lingkungan Hidup) melaksanakan program kerja di bidang pengendalian pencemaran dan perusakan wilayah pesisir berskala nasional. Program tersebut bernama “Pantai Lestari” yang dibuat berdasarkan ketentuan negara melalui Amanat Kebijaksanaan Negara yang tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menyatakan bahwa lingkungan hidup sangat penting bagi pembangunan sehingga fungsi lingkungan harus dilestarikan guna menjamin terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan sebagai perwujudan dari REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) sesuai pada agenda 21 (Kementerian Lingkungan Hidup, 2012).

Saat itu wilayah-wilayah Indonesia yang termasuk dalam wilayah pesisir termasuk Kabupaten Sukabumi hadir dalam pertemuan-pertemuan yang terkait dengan proyek “Pantai Lestari” ini. Disaat yang bersamaan pemerintah Indonesia juga tengah terlibat aktif dalam forum internasional yang membahas akan hal yang tidak jauh berbeda dengan program yang sedang dicanangkan di Indonesia yaitu PEMSEA yang menggagas program ICM, pengelolaan terpadu untuk wilayah pesisir. Sejak saat itu terjadi pembahasan juga mengenai forum internasional (PEMSEA) kepada pemerintah daerah yang berada di kawasan pesisir untuk turut serta telibat dalam forum tersebut.

Kabupaten Sukabumi menjadi salah satu yang terlihat aktif pada saat itu dibandingkan pemerintah kabupaten pesisir yang lainnya dalam setiap kesempatan pertemuan yang diadakan Kementerian Lingkungan Hidup mengenai pengelolaan lingkungan pesisir dengan laporan-laporan kegiatan upaya pengelolaan wilayah pesisir. Karena keaktifannya pada akhirnya Kementerian Lingkungan Hidup

menawarkan kepada KabupatenSukabumi untuk bergabung dalam forum internasional tersebut (PEMSEA). Dalam rentang waktu satu tahun, ditahun 2003 akhirnya Kabupaten Sukabumi ikut berpartisipasi dalam forum internasional yang diwadahi oleh organisasi internasional pemerintah yang bernama *Partnerships in the Environmental Management for Seas of East Asia* (PEMSEA) dengan kategori *Non-Country Partners* sebagai PEMSEA *Network Local Governments* (PNLG). Hal ini ditandai dengan *Memorandum of Agreement* (MoA) antara Pemerintah Sukabumi dan PEMSEA sebagai bukti legalitas bentuk kerjasama.

MoA yang disepakati memiliki durasi waktu selama dua tahun dari tahun 2003 hingga tahun 2005 untuk mengimplementasikan program ICM sebagai program yang harus dilaksanakan secara bersama-sama. Ditahun yang sama Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 214 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Pengelolaan Pesisir Terpadu Kabupaten Sukabumi sesuai dengan MoA antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan PEMSEA.Pasca tahun 2005 yang melewati batas durasi waktu MoA tersebut akhirnya pemerintah kabupaten Sukabumi memperpanjang kembali masa kerjasama yang ditunjukkan melalui Surat Keputusan Bupati Sukabumi No.660.1/Kep.56-BLH/2008 di tahun 2008 dengan isi yang sama dan menyatakan untuk SK ditahun 2003 tidak berlaku lagi. Surat Keputusan sebagai estimasi waktu yang ditetapkan untuk melanjutkan kerjasama berdasarkan MOA antara Kabupaten Sukabumi dan PEMSEA dengan pembentukan tim koordinasi pengelolaan program Sukabumi ICM (Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

3.3.3.2 Mekanisme Operasi *PEMSEA Network Local Governments* (PNLG) Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 660.1/Kep.56-BLH/2008 sesuai MoA yang telah disepakati di tahun 2003 menyatakan bahwa Kabupaten Sukabumi menjadi Pararel Site bagi pelaksanaan kegiatan program model pencegahan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dengan membentuk Tim Koordinasi (*Programme Coordinating Committee*/PCC) yang langsung diketuai oleh Bupati Sukabumi untuk Pengelolaan Pesisir terpadu Kabupaten Sukabumi dengan dimandatkannya Badan Lingkungan Hidup Sukabumi sebagai Sekretariat penyelenggara (*Programme Management Office*).

Adapun tugas daripada PCC sebagai Tim Koordinasi adalah:

a. Menetapkan Rencana Strategi Pesisir (Coastal Strategy);
b. Menyetujui dan menetapkan rencana kerja tahunan dan rencana pembiayaan Sukabumi ICM yang telah disusun oleh PMO (*Programme Management Office*);
c. Menetapkan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dalam program Sukabumi; ICM, yaitu Badan, Lembaga yang ada pada pemerintah, lembaga pendidikan dan penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan swasta di tingkat regional, nasional dan internasional.
d. Mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam program Sukabumi ICM, yaitu Badan, Lembaga yang ada pada pemerintah,

lembaga pendidikan dan penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan swasta di tingkat regional, nasional dan internasional.

e. Mengadakan komunikasi secara periodik dengan pemerintah lokal negara-negara anggota PEMSEA dan PEMSEA Regional Programme Office (PEMSEA RPO) dan PEMSEA National Focal Point;
f. Menetapkan kegiatan Sukabumi ICM sebagai bagian program pembangunan Kabupaten Sukabumi sesuai dengan visi misinya;
g. Mengadakan rapat koordinasi PCC minimal tiga bulan satu kali;
h. Mengawasi perkembanga, kerjasama dan implementasi dari rencana kerja tahunan dan pembiayaan Sukabumi ICM
i. Mengkaji, menyetujui memantau dan mengevaluasi laporan periodik dari PMO tentang perkembangan kemajuan dari siklus ICM dan dampakyang timbul dengan adanya Sukabumi ICM.

PCC dalam melaksanakan tugas tersebut akan dibantu oleh Sekretariat Penyelenggara (PMO) yang juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, antara lain:

a. Menyusun rencana strategi pesisir (*Coastal Strategy*);
b. Menyusun secara rinci rencana kerja tahunan dan rencana pembiayaan Sukabumi ICM dalam kaitan pelaksanaan siklus ICM dengan bantuan PEMSEA RPO;
c. Melaksanakan kebijakan serta keputusan dari PCC yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi (*term of reference*) yang telah dibuat dan disetujui Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan PEMSEA RPO;

d. Menjalankan tugas sebagai sekretariat PCC dengan melaksanakan kegiatan sehari-hari Sukabumi ICM, dengan bantuan dan konsultasi dari RPO;
e. Mendokumentasikan aktivitas dan proses-proses Sukabumi ICM dalam perencanaan, pelaksanaan dan manajemen termasuk hasil pencapaian, dampak, hambatan, pengalaman, dan pelajaranyang didapat;
f. Menyebarkan pengalaman dan pengetahuan yang diterima Sukabumi ICM untuk memfasilitasi penerapan, pendekatan, ICM di tempat lain di Indonesia;
g. Berpartisipasi dalam jaringan pemerintah lokal negara-negara anggota PEMSEA untuk berbagi pengetahuan,pengalaman, keahlian, dan pembelajaran dalam perencanaan dan manajemen sumber daya pesisir, serta dengan program-program lain yang terkait;
h. Mengadakan rapat koordinasi PMO minimal 1 bulan satu kali;
i. Menggunakan kebijakan, perangkat, teknik dan praktek yang dikembangkan untuk diterapkan pada Sukabumi ICM, guna membentuk program manajemen lingkungan yang berkelanjutan di Sukabumi, yang akan terus berkembang walaupun proyek ICM selesai;
j. Membuat laporan-laporan periodik, peta, rekaman, data dan bahan lain baik yang dipublikasikan maupun tidak, yang dianggap penting dalam pengembangan dan pelaksanaan proyek untuk disetujui oleh PCC serta melaporkannya kepada PEMSEA RPO dan Sekretariat PNLG yang salinannya diberikan kepada PEMSEA National Focal Point.

Untuk masalah pembiayaan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sukabumi disebutkan bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi (Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, 2012).

3.4 Kondisi Ekosistem Terumbu Karang di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat

Kabupaten Sukabumi terletak antara $6^0$57'-$7^0$25' Lintang Selatan dan $106^0$49'-$107^0$00' Bujur Timur, dengan batas-batas administrasi antara lain: disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor, disebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Samudera Indonesia (Samudera Hindia). Kabupaten Sukabumi menjadi salah satu wilayah pesisir Indonesia yang terletak di Propinsi Jawa Barat yang memiliki luas sebesar 4.128 km^2 atau 14,39 persen dari luas Jawa Barat atau 3,01 persen dari luas Pulau Jawa dengan panjang garis pantai sekitar 117 km (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, 2011).

Karakteristik umum oseanografi Kabupaten Sukabumi berhadapan dengan Samudera Hindia, namun terlindung karena berbentuk teluk. Karakteristik Samudera Hindia bercirikan ombak besar, batimetri laut dalam dan tinggi gelombang dapat mencapai lebih dari 3 meter. Keadaan arus pada perairan dipengaruhi oleh pasang surut, angin, densitas serta pengaruh masukan air dari

muara sungai.Kisaran suhu pada perairan Kabupaten Sukabumi berkisar antara 27^{o}C–30^{o}C (Sugiarto dan Birowo, 1975). Tinggi Gelombang di Palabuhanratu dapat berkisar antara 1–3 meter (Pariwono *et. al*., 1988). Kondisi kualitas air perairan laut di Kabupaten Sukabumi, tergolong bagus yang tercermin dari penampakan air yang bening dan kecerahan (cahaya matahari yang dapat menembus perairan mencapai 6–7 meter), meskipun demikian di beberapa muara sungai besar perairannya terlihat coklat terutama pada musim hujan (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, 2011).

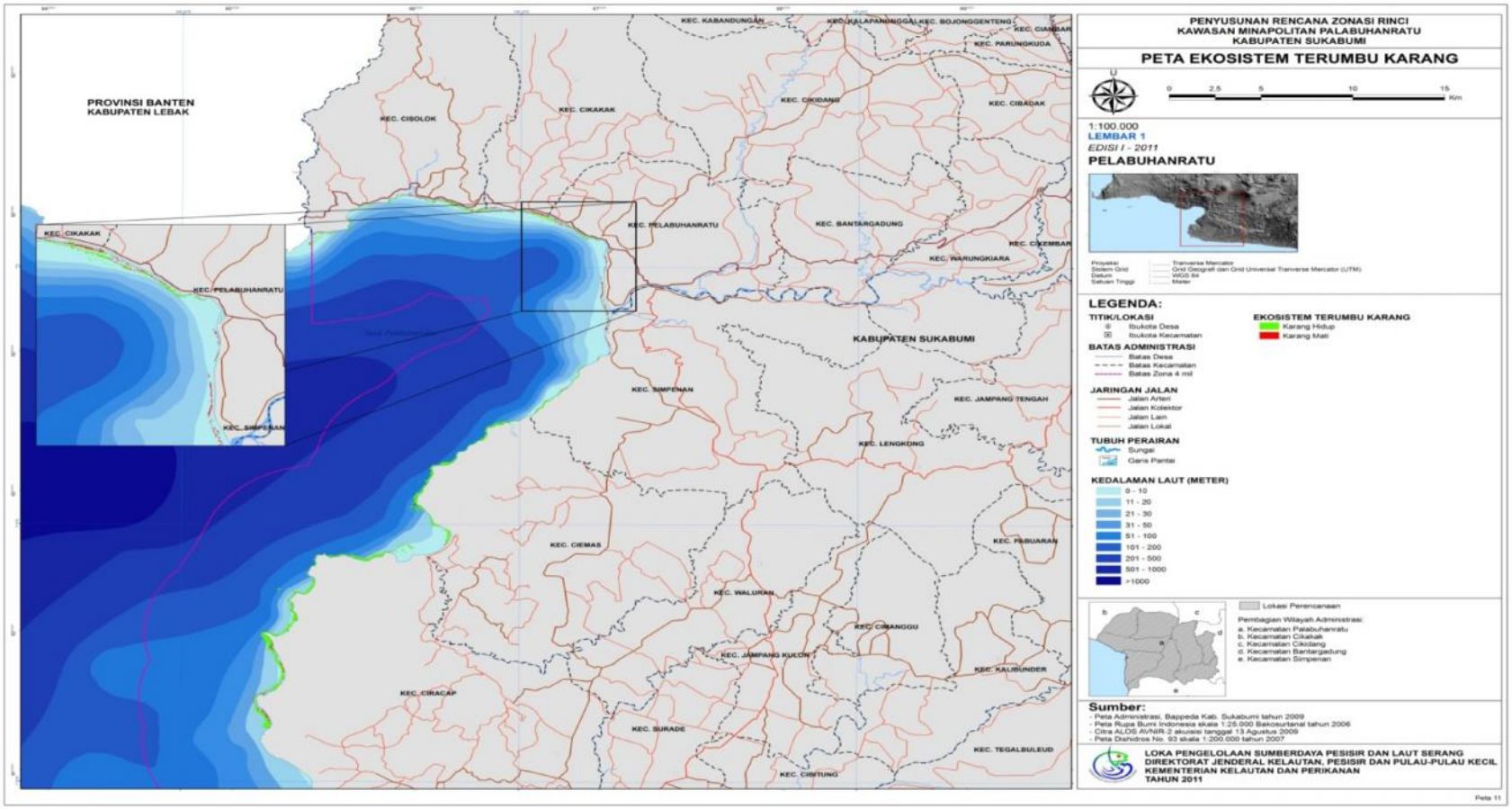
Wilayah pesisir Sukabumi menyediakan potensi sumber daya alam yang beragam meliputi: mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang masing-masing tersebar di wilayah pesisir kabupaten Sukabumi yang terdiri dari sembilan kecamatan yang terhubung langsung dengan Samudera Hindia antara lain: Cisolok, Cikakak, Palabuhanratu, Simpenan, Ciemas, Ciracap, Surade, Cibitung dan Tegal Buleud (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi). Teluk Palabuhanratu menjadi salah satu potensi wilayah pesisir di Kabupaten Sukabumi. Terdapat empat kecamatan yang secara administratif berbatasan dengan Teluk Palabuhanratu yakni Cisolok, Cikakak, Palabuhanratu dan Simpenan (Wahyudin, 2010:21).

Sumberdaya terumbu karang di Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi mengalami degradasi yang signifikan akibat pemanfaatan yang tidak berkelanjutan. Jumlah lokasi terumbu karang ada sekitar 7 lokasi perairan.Salah satu lokasi perairan di wilayah pesisir Kabupaten Sukabumi memiliki ekosistem terumbu karang adalah di perairan Ujunggenteng Kecamatan Ciracap. Luas

kawasan terumbu karang yang ada sekitar 1.305 Ha(RTRW Pesisir Kabupaten Sukabumi, 2009).

Selain sebagai habitat bagi ikan hias, terumbu karang juga berfungsi sebagai objek wisata bahari dan penahan gelombang alamiah.Saat ini, diperkirakan kawasan terumbu karang tersebut mengalami kerusakan dengan kondisi kurang baik sekitar 50% dalam keadaan rusak dengan tutupan kurang dari 10%. Berdasarkan data terakhir luas terumbu karang yang masih kategori bagus sekitar 22,8 ha(RTRW Pesisir Kabupaten Sukabumi, 2009). Jenis-jenis karang yang teridentifikasi terdiri dari karang otak dan karang meja. Terumbu karang di Ujung Genteng terdapat pada 3 (tiga) titik lokasi(RTRW Pesisir Kabupaten Sukabumi, 2009)titik yang membentuk spot-spot. Salah satu bukti yang sangat mengejutkan dari penglihatan peta citra satelit wilayah pesisir Kabupaten Sukabumi, Teluk Palabuhanratu menjadi wilayah yang mengalami kerusakan terumbu karang yang paling parah dari sembilan daerah pesebaran terumbu karang di Kabupaten Sukabumi. Hampir disepanjang Teluk Palabuhanratu karang mati dapat ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi terumbu karang di Teluk Palabuhanratu terancam keberadaannya (terlihat pada tanda yang bewarna merah yang terbentang dari kecamatan Cisolok hingga kecamatan Simpenan yang berarti terdapat karang mati disana).

Gambar 3.2**Peta Ekosistem Terumbu Karang tahun 2011**



(sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2012)

Pada tahun 2009 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan rencana zonasi laut untuk melihat sejauh mana keadaan dan potensi sumberdaya pesisir dan kelautan di Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Zonasi pesisir bertujuan untuk memperbaiki ekosistem pesisir yang sudah rusak. Pada prinsipnya wilayah pesisir dipetakan untuk kemudian direncanakan strategi pemulihan dan prioritas pemulihan yang diharapkan. Pembagian zonasi pesisir dapat berupa zona penangkapan ikan, zona konservasi maupun lainnya sesuai dengan kebutuhan/pemanfaatan wilayah tersebut, disertai dengan zona penyangga karena sulit untuk membatasi zona-zona yang telah ditetapkan di laut. Ekosistem terumbu karang dapat dipulihkan dengan memasukkannya ke dalam zona konservasi yang tidak dapat diganggu oleh aktivitas masyarakat sehingga dapat tumbuh dan pulih secara alami (Keputusan Menteri No. 04 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang).

Dengan mengetahui spot-spot terumbu karang yang mengalami kerusakan tersebut akan memudahkan untuk melakukan penangan dalam bentuk tindak lanjut koservasi yang didalamnya terdapat perlakuan rehabilitasi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang terlampir bahwa kerusakan terumbu karang dapat diukur melalui parameter Luas tutupan terumbu karang yang hidup semakin kecil prosentasenya maka semakin buruk keadaan terumbu karangnya.

Tabel 3.2 **Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang**

Paramaeter	**Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang** (dalam%)		
Prosentase Luas Tutupan Terumbu Karang yang Hidup	Rusak	Buruk	0-24,9
		Sedang	25-49,9
	Buruk	Baik	50-74,9
		Baik Sekali	75-100
Keterangan: Prosentase Luas Tutupan Terumbu Karang yang Hidup yang dapat ditenggang: 50-100%.			

(sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012)

Jadi keadaan terumbu karang yang terdapat di perairan Ujunggenteng Kecamatan Ciracap berdasarkan RTRW Pesisir Kabupaten Sukabumi bahwa hasil terumbu karang saat ini di wilayah Pesisir Kabupaten Sukabumi tengah dalam status “buruk” jika dilihat dari parameter yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.04 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang.